

# Daftar Periksa



# ATURAN TATA KELOLA dan KELEMBAGAAN





# Isi

<b>01.</b>	<b>Pendahuluan</b>	01
<b>02.</b>	<b>Tujuan dan Pelaku Utama</b>	03
<b>03.</b>	<b>Empat Tema Utama Terkait Aturan Tata Kelola dan Kelembagaan</b>	05
	<b>Tema 1</b>	
	Peringatan Dini Dipastikan menjadi Prioritas Jangka Panjang di Daerah	06
	<b>Tema 2</b>	
	Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Mendukung Peringatan Dini Disusun	10
	<b>Tema 3</b>	
	Kapasitas Kelembagaan Dikaji dan Ditingkatkan	16
	<b>Tema 4</b>	
	Sumber Daya Keuangan Dijamin	20
	<b>Aspek Lainnya</b>	24



# 01. Pendahuluan

Implementasi Peringatan Dini Tsunami di Masyarakat adalah sebuah proses yang bergantung pada banyak faktor dan pelaku. Untuk menjalankan proses ini dibutuhkan kajian mengenai keadaan saat ini, perencanaan aktivitas, dan pengawasan. Daftar periksa di bawah mendukung proses dengan menyediakan sebuah perangkat sederhana bagi otoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, daftar periksa ini didasarkan pada dokumen “*Developing Early Warning System: A Checklist*” yang diterbitkan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) sebagai hasil dari “*Third International Conference in Early Warning – From Concept to action*” pada tahun 2006. Pelaku di daerah dapat menggunakan perangkatnya sendiri, tanpa melibatkan ahli ataupun sumber eksternal. Namun, perlu diingat bahwa kajian pribadi membutuhkan sikap kritis terhadap diri sendiri dan terbuka.

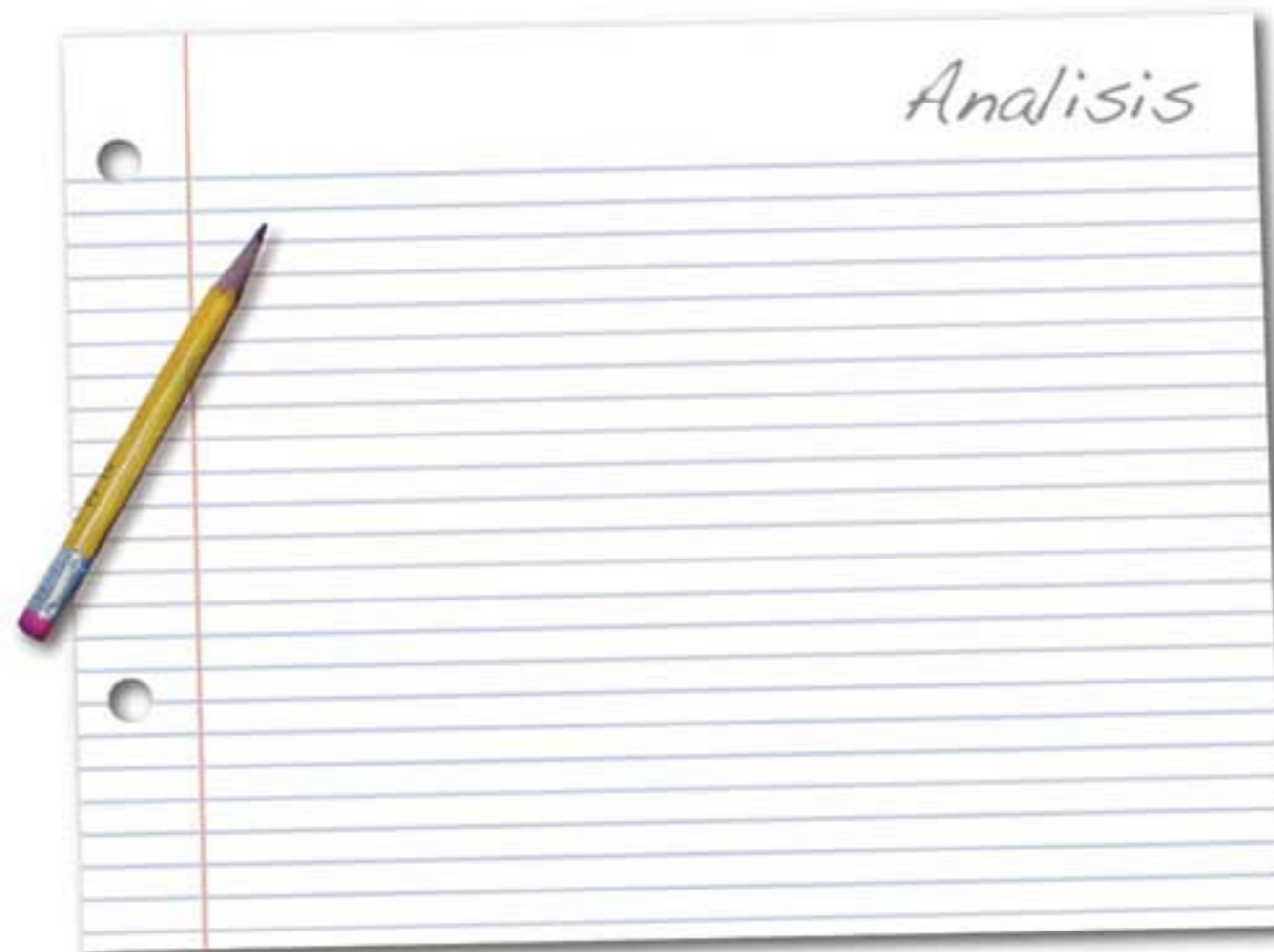
## Cara Menggunakan

Daftar Periksa ini memberikan 3 cara untuk mengkaji, merencanakan, dan mengawasi implementasi.

Tabel ‘pelaku utama’ digunakan untuk mencatat semua pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Kotak abu-abu digunakan untuk mengkaji kemajuan dan prioritas.

<b>Kemajuan</b> :	 belum dimulai  hampir selesai dilakukan	 langkah awal sudah dilakukan  sudah selesai dilakukan	 sedang dilakukan
<b>Tindakan yang diperlukan &amp; prioritas</b> :	 prioritas tinggi	 prioritas sedang	 tidak perlu tindakan apa-apa



Setelah setiap tema, kotak “Analisis” memberikan ruang tambahan untuk mencatat dan merefleksikan tantangan, halangan, dan kisah keberhasilan saat implementasi, dengan demikian membantu memonitor dan memantau proses serta menemukan solusi.

# 02. Tujuan & Pelaku Utama

## Tujuan

Tujuan daftar periksa dalam elemen Aturan Tata Kelola dan Kelembagaan adalah untuk:

Mengembangkan kerangka kerja kelembagaan, perundang-undangan, kebijakan yang mendukung pelaksanaan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang efektif.

Tabel 'pelaku utama' digunakan untuk mencatat semua pelaku yang terlibat dalam implementasi.



# 03. Empat Tema Utama Terkait Aturan Tata Kelola dan Kelembagaan

Tema 1: Peringatan Dini Dipastikan menjadi Prioritas Jangka Panjang di Daerah

Tema 2: Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Mendukung Peringatan Dini Disusun

Tema 3: Kapasitas Kelembagaan Dikaji dan Ditingkatkan

Tema 4: Sumber Daya Keuangan Dijamin



Aspek-aspek lain:

- Pendekatan Multi-Bahaya
- Keterlibatan Masyarakat
- Pertimbangan Perspektif Gender dan Keragaman Budaya

## Tema 1: Peringatan Dini Dipastikan menjadi Prioritas Jangka Panjang di Daerah

Sistem peringatan dini dapat berkesinambungan jika dipadukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otoritas dan pimpinan politik yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan perlu memahami pentingnya sistem peringatan dini dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Untuk mendukung proses ini, berbagai studi kasus dan contoh keberhasilan sehubungan dengan peringatan dini perlu disebarluaskan.

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
1.	<p><b>Manfaat ekonomi peringatan dini</b></p> <p>Metode sederhana digunakan untuk menganalisis manfaat ekonomi peringatan dini (misalnya <i>profit loss analysis</i> dari bencana telah terjadi).</p> <p>Manfaat ekonomi peringatan dini disampaikan kepada otoritas dan pimpinan politik.</p>		
2.	<p><b>Penyebaran contoh keberhasilan</b></p> <p>Studi kasus dan contoh keberhasilan sehubungan dengan peringatan dini disebarluaskan kepada otoritas dan pimpinan politik.</p>		

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
3.	<p><b>Pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan daerah</b></p> <p>Peringatan dini dipadukan dalam perencanaan pembangunan daerah.</p>		







# Analisis



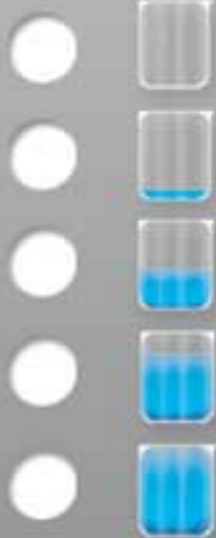



## Tema 2: Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Mendukung Peringatan Dini Disusun



Salah satu masalah mendasar sistem peringatan dini berkaitan dengan pengaturan kelembagaan dan penyusunan kerangka hukum. Masalah mendasar itu meliputi peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang menetapkan dan menjelaskan peran dan tanggung jawab, koordinasi, kesepakatan lintas anggaran, pemaduan ke dalam kebijakan pengurangan bencana dan pembangunan, serta pemantauan dan pelaksanaannya.

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
1.	<p><b>Dasar hukum bagi pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem peringatan dini</b></p> <p>Peraturan atau kebijakan daerah disusun sebagai dasar hukum dan kelembagaan bagi pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem peringatan dini.</p>		
2.	<p><b>Peran dan tanggung jawab yang jelas</b></p> <p>Peran dan tanggung jawab yang jelas ditetapkan bagi semua organisasi (pemerintah dan non-pemerintah) yang terlibat dalam peringatan dini.</p>		



No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
3.	<p><b>Koordinasi</b></p> <p>Satu lembaga tingkat pusat ditunjuk dengan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas untuk melakukan koordinasi peringatan dini.</p>		
4.	<p><b>Kesepakatan lintas batas</b></p> <p>Kesepakatan tingkat provinsi dan antar kabupaten/kota terbangun untuk memastikan keterpaduan sistem peringatan dini.</p>		



No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
5.	<p><b>Pemaduan dalam kebijakan pengurangan bencana dan pembangunan</b></p> <p>Peringatan dini dipadukan dalam kebijakan pengurangan bencana dan pembangunan.</p>		

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
6.	<p><b>Pemantauan dan pelaksanaan</b></p> <p>Pemantauan dan pelaksanaan dilakukan untuk mengoperasionalkan kebijakan dan peraturan.</p>		


# Analisis



## Tema 3: Kapasitas Kelembagaan Dikaji dan Ditingkatkan

Pengkajian kapasitas organisasi dan lembaga yang terlibat dalam sistem peringatan dini tsunami dilakukan sebelum menyusun perencanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan program pelatihan. Pemerintah dan non-pemerintah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta sektor swasta perlu berperan dalam peningkatan kapasitas.



No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
1.	<p><b>Pengkajian dan peningkatan kapasitas</b></p> <p>Kapasitas semua organisasi dan lembaga yang terlibat dikaji.</p>		
	<p>Rencana peningkatan kapasitas disusun.</p> <p>Program pelatihan dikembangkan dan sumber daya yang dibutuhkan disiapkan.</p>		

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
2.	<p><b>Sumbangan non-pemerintah</b></p> <p>Sektor non-pemerintah (LSM, sektor swasta) terlibat dan didorong untuk berperan dalam peningkatan kapasitas.</p>		

# Analisis




## Tema 4: Sumber Daya Keuangan Dijamin

Untuk menjamin sumber daya keuangan bagi sistem peringatan dini, otoritas perlu menyusun dan melembagakan mekanisme pendanaan. Selain itu, selama pelaksanaan, masyarakat dapat membangun kemitraan dengan sektor publik/swasta.



No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
1.	<p><b>Mekanisme pendanaan</b></p> <p>Mekanisme anggaran daerah disusun dan dilembagakan.</p>		

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
2.	<p><b>Kemitraan publik swasta</b></p> <p>Kemitraan publik swasta dikaji dan digunakan untuk membantu pelaksanaan sistem peringatan dini.</p>		

# Analisis



## Aspek Lainnya

### **Pendekatan Multi-Bahaya**

Sistem peringatan dini sedapat mungkin terhubung dengan semua sistem bahaya lainnya. Indikator ekonomi dapat ditingkatkan jika sistem terbentuk dan berfungsi dalam kerangka pendekatan multi-bahaya yang mempertimbangkan semua bahaya dan kebutuhan pengguna akhir.

Sistem peringatan dini multi-bahaya juga akan lebih sering diaktifkan daripada sistem peringatan satu jenis bahaya. Oleh karena itu, sistem harus berfungsi dan handal untuk kejadian-kejadian dengan dampak besar, misalnya tsunami, yang jarang terjadi. Sistem multi-bahaya juga membantu masyarakat memahami dengan lebih baik risiko yang dihadapi dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respon peringatan.

### **Keterlibatan Masyarakat**

Sistem peringatan dini berbasis masyarakat bergantung pada keterlibatan langsung masyarakat berisiko. Tanpa keterlibatan otoritas daerah dan masyarakat berisiko, intervensi dan respon pemerintah dan lembaga terhadap bahaya mungkin tidak akan memadai.





Pendekatan *bottom-up* yang melibatkan partisipasi masyarakat memungkinkan respon multi-dimensi terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada. Dengan cara ini, komunitas, masyarakat dan pimpinan adat dapat berperan aktif dalam pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas di tingkat daerah.

### **Pertimbangan Perspektif Gender dan Keragaman Budaya**

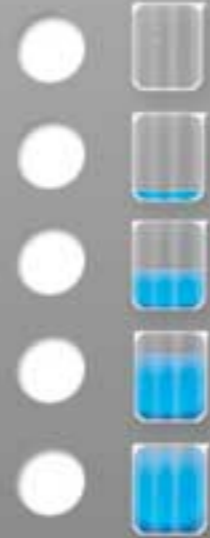



Dalam mengembangkan sistem peringatan dini, perlu dilihat bahwa setiap komunitas yang berbeda mempunyai kerentanan yang berbeda pula, sesuai dengan budaya atau karakteristik lain yang mempengaruhi kemampuan menyiapkan diri, mencegah dan merespon bencana secara efektif. Perempuan dan laki-laki sering memainkan peran yang berbeda dalam masyarakat dan mempunyai akses yang berbeda terhadap informasi pada situasi bencana. Selain itu, lanjut usia, difabel dan kelompok marginal sering kali lebih rentan.

Informasi, pengaturan kelembagaan, dan sistem komunikasi peringatan harus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas rentan.

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
1.	<p><b>Pendekatan multi-bahaya</b></p> <p>Sistem dengan pendekatan multi-bahaya dikembangkan.</p> <p>Hubungan dan rencana operasional untuk sistem multi-bahaya dikembangkan dengan memasukkan pendekatan <i>profit loss</i>.</p>		

No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
2.	<p><b>Keterlibatan masyarakat</b></p> <p>Ada keterlibatan langsung dari masyarakat berisiko.</p>		
	<p>Pendekatan <i>bottom-up</i> digunakan.</p> <p>Peran komunitas setempat, masyarakat dan pimpinan adat dipantau. Hasil pembelajaran didokumentasikan.</p>		



No.	Aspek	Kemajuan	Tindakan yang diperlukan & prioritas
3.	<p><b>Pertimbangan perspektif gender dan keragaman budaya</b></p> <p>Kerentanan lintas budaya, gender atau karakteristik lain dikenali dalam kajian kerentanan.</p>		
	<p>Perbedaan peran serta akses perempuan dan laki-laki terhadap informasi dikaji. Demikian pula lanjut usia, difabel dan kelompok marginal.</p> <p>Informasi, pengaturan kelembagaan dan sistem komunikasi peringatan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas rentan.</p>		



Analisis



GTZ Office Jakarta  
Menara BCA 46th Floor  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
T: +62-21-2358 7111  
F: +62-21-2358 7110  
E: [gtz-indonesien@gtz.de](mailto:gtz-indonesien@gtz.de)  
I: [www.gtz.de/indonesia](http://www.gtz.de/indonesia)  
[www.gitews.org/tsunami-kit](http://www.gitews.org/tsunami-kit)



**German - Indonesia Cooperation for a  
Tsunami Early Warning System**



**Federal Ministry  
of Education  
and Research**